



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Sistem pemberian uang muka kerja dilakukan dengan mekanisme uang yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (2) UP belum membebani realisasi anggaran.
- (3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (*revolving*) sepanjang dananya masih tersedia.

Pasal 2

- (1) Pengisian kembali UP, dapat diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu bulan.
- (2) Batasan uang kas yang dipegang/disimpan dalam brankas oleh Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada akhir tahun anggaran sisa uang persediaan disetor ke Kas Daerah/saldo kas nihil.
- (3) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil (SPP-GU Nihil).

Pasal 3

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak dengan sisa dana UP yang tersedia tidak mencukupi, Perangkat Daerah dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pasal 4

Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 2

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
 PERANGKAT DAERAH DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN
 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
 ANGGARAN 2020

| NO | PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN | BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp) |
|----|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 460.000.000 |
| 2 | TK Negeri Demak | 8.800.000 |
| 3 | SMP Negeri 1 Demak | 2.500.000 |
| 4 | SMP Negeri 2 Demak | 2.500.000 |
| 5 | SMP Negeri 3 Demak | 2.500.000 |
| 6 | SMP Negeri 4 Demak | 2.500.000 |
| 7 | SMP Negeri 5 Demak | 2.500.000 |
| 8 | SMP Negeri 1 Karangtengah | 2.500.000 |
| 9 | SMP Negeri 2 Karangtengah | 2.500.000 |
| 10 | SMP Negeri 1 Sayung | 2.500.000 |
| 11 | SMP Negeri 2 Sayung | 2.500.000 |
| 12 | SMP Negeri 1 Mranggen | 2.500.000 |
| 13 | SMP Negeri 2 Mranggen | 2.500.000 |
| 14 | SMP Negeri 3 Mranggen | 2.500.000 |
| 15 | SMP Negeri 1 Karangawen | 2.500.000 |
| 16 | SMP Negeri 2 Karangawen | 2.500.000 |
| 17 | SMP Negeri 1 Guntur | 2.500.000 |
| 18 | SMP Negeri 2 Guntur | 2.500.000 |
| 19 | SMP Negeri 3 Guntur | 2.500.000 |
| 20 | SMP Negeri 1 Wonosalam | 2.500.000 |
| 21 | SMP Negeri 2 Wonosalam | 2.500.000 |
| 22 | SMP Negeri 1 Kebonagung | 2.500.000 |
| 23 | SMP Negeri 2 Dempet | 2.500.000 |
| 24 | SMP Negeri 3 Dempet | 2.500.000 |
| 25 | SMP Negeri 1 Gajah | 2.500.000 |
| 26 | SMP Negeri 2 Gajah | 2.500.000 |
| 27 | SMP Negeri 1 Karanganyar | 2.500.000 |
| 28 | SMP Negeri 2 Karanganyar | 2.500.000 |
| 29 | SMP Negeri 1 Mijen | 2.500.000 |
| 30 | SMP Negeri 2 Mijen | 2.500.000 |
| 31 | SMP Negeri 1 Bonang | 2.500.000 |

| | | |
|----|--|-------------|
| 32 | SMP Negeri 2 Bonang | 2.500.000 |
| 33 | SMP Negeri 3 Bonang | 2.500.000 |
| 34 | SMP Negeri 1 Wedung | 2.500.000 |
| 35 | SMP Negeri 2 Wedung | 2.500.000 |
| 36 | SKB Demak | 45.000.000 |
| 37 | Dinas Kesehatan | 700.000.000 |
| 38 | Puskesmas Demak I | 62.100.000 |
| 39 | Puskesmas Demak II | 62.700.000 |
| 40 | Puskesmas Demak III | 68.000.000 |
| 41 | Puskesmas Bonang I | 74.300.000 |
| 42 | Puskesmas Bonang II | 67.100.000 |
| 43 | Puskesmas Wedung I | 89.500.000 |
| 44 | Puskesmas Wedung II | 71.700.000 |
| 45 | Puskesmas Mijen I | 99.500.000 |
| 46 | Puskesmas Mijen II | 64.600.000 |
| 47 | Puskesmas Karangnyar I | 72.600.000 |
| 48 | Puskesmas Karangnyar II | 74.800.000 |
| 49 | Puskesmas Gajah I | 50.200.000 |
| 50 | Puskesmas Gajah II | 75.700.000 |
| 51 | Puskesmas Sayung I | 67.800.000 |
| 52 | Puskesmas Sayung II | 72.100.000 |
| 53 | Puskesmas Karangawen I | 113.500.000 |
| 54 | Puskesmas Karangawen II | 65.800.000 |
| 55 | Puskesmas Dempet | 46.800.000 |
| 56 | Puskesmas Guntur I | 90.000.000 |
| 57 | Puskesmas Guntur II | 62.000.000 |
| 58 | Puskesmas Mranggen I | 67.200.000 |
| 59 | Puskesmas Mranggen II | 66.300.000 |
| 60 | Puskesmas Mranggen III | 82.100.000 |
| 61 | Puskesmas Wonosalam I | 68.300.000 |
| 62 | Puskesmas Wonosalam II | 45.000.000 |
| 63 | Puskesmas Karangtengah | 69.400.000 |
| 64 | Puskesmas Kebonagung | 87.700.000 |
| 65 | Laboratorium Kesehatan | 31.500.000 |
| 66 | RSUD Sultan Fatah | 775.000.000 |
| 67 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 400.000.000 |
| 68 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 200.000.000 |
| 69 | Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 250.000.000 |
| 70 | Satuan Polisi Pamong Praja | 255.000.000 |
| 71 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 280.000.000 |
| 72 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 200.000.000 |
| 73 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 250.000.000 |
| 74 | Dinas Lingkungan Hidup | 700.000.000 |
| 75 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 180.000.000 |
| 76 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 500.000.000 |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 77 | Dinas Perhubungan | 216.000.000 |
| 78 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 200.000.000 |
| 79 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100.000.000 |
| 80 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 150.000.000 |
| 81 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 126.000.000 |
| 82 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 205.000.000 |
| 83 | Dinas Pariwisata | 225.000.000 |
| 84 | Dinas Pertanian dan Pangan | 449.400.000 |
| 85 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 388.000.000 |
| 86 | Sekretariat Daerah | 1.700.000.000 |
| 87 | Sekretariat DPRD | 2.000.000.000 |
| 88 | Kecamatan Demak | 182.900.000 |
| 89 | Kecamatan Karangtengah | 78.000.000 |
| 90 | Kecamatan Dempet | 55.500.000 |
| 91 | Kecamatan Wonosalam | 47.300.000 |
| 92 | Kecamatan Mijen | 60.200.000 |
| 93 | Kecamatan Gajah | 40.000.000 |
| 94 | Kecamatan Bonang | 61.900.000 |
| 95 | Kecamatan Wedung | 44.700.000 |
| 96 | Kecamatan Sayung | 45.000.000 |
| 97 | Kecamatan Karanganyar | 47.700.000 |
| 98 | Kecamatan Mranggen | 47.000.000 |
| 99 | Kecamatan Guntur | 60.500.000 |
| 100 | Kecamatan Karangawen | 53.900.000 |
| 101 | Kecamatan Kebonagung | 52.200.000 |
| 102 | Inspektorat Daerah | 221.000.000 |
| 103 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 384.800.000 |
| 104 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 300.000.000 |
| 105 | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan | 325.000.000 |
| | JUMLAH | 15.121.600.000 |

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR